

ENCANA...

Bupati Baru

Di (DIY) memiliki tiga bupati/wakil bupati, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman dilakukan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Yogyakarta, Rabu (17/2). Hal ini di hampir seluruh wilayah Indonesia, atau tidak dilaksanakan karena sesuatu hal.

Salah satu bupati baru dilantik itu adalah Sri Purnomo di Kabupaten Sleman, kemudian H Suharsono dan H Satrio di Kabupaten Bantul, serta Badingah dan Imungunungkidul. Sebagian diantara mereka telah terpilih seperti Sri Purnomo, Badingah dan Imungunungkidul.

Salah satu bupati baru dilantiknya mereka secara resmi mereka adalah figur-figur yang banyak dikenal masyarakat di DIY ini di tahun 2016-2021. Ketiga masa kampanye mereka, mereka memang bersaing dengan para bupati lainnya. Namun kini, setelah mereka dilantik, mereka bukan lagi bupati baru yang tidak memilih mereka. Mereka mendukung mereka dalam rangka membangun kabupaten yang mereka pimpin. Mereka memiliki keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan. Para pemimpin baru dapat memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, dan menghilangkan kelemahan dan ancaman mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi mereka, meski dengan tujuan pembangunan berjalan mulus dan lancar. Kadang-kadang tanggapan keras atau bahkan penolakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Soal hal itu benar atau salah (daerah) yang benar dan baik akan ditentukan oleh masyarakat. Kalau hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa pembangunan yang mereka lakukan akan berbalik menjadi dukungan masyarakat. Atau hal-hal yang bersifat kebendaan yang membangun sumber daya manusia (SDM) yang mereka lakukan kini dan mendatang, memang tidak dapat dibuktikan. Kalau demikian, maka pembangunan sekolah/kampus yang baik dan benar akan menjamin sepenuhnya keberhasilan pembangunan. Kalau tidak, maka pembangunan akan gagal. Kalau tidak, maka pembangunan akan gagal. Kalau tidak, maka pembangunan akan gagal.

Salah satu tantangan yang dihadapi mereka, meski dengan tujuan pembangunan berjalan mulus dan lancar. Kadang-kadang tanggapan keras atau bahkan penolakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Soal hal itu benar atau salah (daerah) yang benar dan baik akan ditentukan oleh masyarakat. Kalau hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa pembangunan yang mereka lakukan akan berbalik menjadi dukungan masyarakat. Atau hal-hal yang bersifat kebendaan yang membangun sumber daya manusia (SDM) yang mereka lakukan kini dan mendatang, memang tidak dapat dibuktikan. Kalau demikian, maka pembangunan sekolah/kampus yang baik dan benar akan menjamin sepenuhnya keberhasilan pembangunan. Kalau tidak, maka pembangunan akan gagal. Kalau tidak, maka pembangunan akan gagal.

Optimalisasi KPK dan Peran Pendidikan

Oleh: Brigida Intan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan komitmen terhadap berbagai bentuk rencana maupun tindakan korupsi. Terbukti ketika Sabtu 13 Februari 2016 KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus suap Kasubdit hakim MA (Mahkamah Agung).

Sebelumnya, publik dicemasakan dengan penyempitan ruang gerak KPK dengan rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik menilai ini merupakan tindak pelemahan bagi lembaga KPK. Berdasarkan survei indikator, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK meningkat sekitar 79,6%.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada beberapa poin revisi yang potensial melemahkan KPK. Diantaranya pemangkasan kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik secara mandiri, pembatasan penyidik KPK yang dapat melakukan propenyidikan, reduksi pengaturan penyadapan, hingga peluang penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (SP3).

Revisi ini tidak menjadi solusi mengingat Indonesia sedang dalam krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Elektabilitas partai besar dalam pemerintahan terhadap publik seharusnya mampu menunjukkan keseimbangan di semua lembaga penegak hukum. Jika dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung, keduanya

tidak memiliki dewan pengawas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) misalnya, hanya berfungsi untuk menyediakan nama-nama untuk calon Kapolri. Sedangkan di Kejaksaan Agung, ada Komisi Kejaksaan hanya berfungsi untuk mengawasi peningkatan kemampuan dan kinerja kejaksaan.

Masyarakat perlu menyadari pendirian KPK pada tanggal 29 September 2002 merupakan titik balik dari pemerintahan. Meskipun begitu dalam perjalanannya kinerja dan prestasi KPK seolah menjadi benalu bagi sebagian elit yang duduk di pemerintahan. Terbukti hingga saat ini tindakan represif masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku. Perlu tindakan preventif terhadap potensi-potensi korupsi dari berbagai segi kehidupan.

Sistem pendidikan sebagai media Mengingat begitu beratnya tugas KPK yang hingga kini harus memperjuangkan martabat Bangsa demi kebenaran dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi yang merugikan negara, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk bersatu mengikis korupsi dan segala bentuk tindakan yang bermaksud menyingkirkan lembaga KPK. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan.

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sistem pendidikan anti korupsi yang berisi sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak

pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendekatan akademis ini, diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang kokoh dan punya integritas kuat, bukan yang hanyut oleh arus globalisasi yang hedonis dan konsuméristik.

Penanaman sistem pendidikan anti korupsi bagi generasi muda bertujuan, pertama, agar semangat anti korupsi mengalir di dalam darah setiap generasi yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jika korupsi dini sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua, agar generasi mampu membangun nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi generasi dalam melawan korupsi. Ketiga, setiap orang menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap elemen baik keluarga, pendidikan maupun lingkungan masyarakat.

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat setiap pemuda bangsa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan tidak jujur. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan sanksinya.

Selain itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistematis di semua tingkat institusi pendidikan

an, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, korupsi waktu dan kurang disiplin. Kebiasaan yang kurang disiplin ini menjadi lumrah dan menjadi suatu kebiasaan, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat.

Usaha untuk menanam benih anti korupsi dapat dilakukan lewat beberapa proses. Pertama, menanamkan beberapa norma dan etika dari dalam keluarga dari usia TK hingga Perguruan Tinggi, mengenai baik dan benar, segala larangan, perilaku menyimpang, melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma sosial. Kedua, para generasi hendaknya tanggap informasi yang mampu ditunjukkan menggunakan berbagai argumen yang menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan individu, keluarga dan sesama. Ketiga, setiap anak dibujuk agar mampu membuat dirinya bersikap kritis. Sikap kritis menjadi sangat kuat bila diarahkan untuk mengembangkan sesuatu dengan penalaran intensif yang akan menjernihkan hati dan menjauhkan diri dari kenistaan.

Lembaga pendidikan akan menjadi pionier bagi pemberantasan korupsi sehingga secara otomatis membantu lembaga KPK dalam memberantas mafia-mafia koruptor yang menelan pendapatan negara. Lembaga KPK patut didukung keberadaannya dan keberlanjutannya. Dengan demikian diharapkan akan lahir generasi anti korupsi sehingga di masa yang akan datang tercipta Indonesia yang bersih dan aman. ***

Brigida Intan MPd, Dosen Sejarah FKIP USD Yogyakarta

Pendidikan Moral Modal SDM

Oleh : L Naga Ligan

MENURUT Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia meningkat dari Agustus 2014 sebesar 5,97% menjadi 6,18% di Agustus 2015.

diberikan dalam keluarga dapat dimulai dari usia balita. Pengaruh orangtua

diri. SDM yang memiliki karakter seperti itu jelas tidak akan dapat bertahan di dunia kerja. Hal ini

lah Anda melanggar aturan yang sudah Anda dan keluarga buat.

Yang keempat adalah menggunakan pola asuh yang baik dalam keluarga. Pola asuh yang baik adalah pola asuh otoritatif atau demokratis. Sebagai orangtua, kedekatan dengan